

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam adalah lembaga keuangan perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Antonio dan Perwataatmadja (1997) membedakan antara Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Syariah adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, (2) bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist. Sementara bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam (Muhammad, 2005: 1).

Secara kelembagaan, bank Islam di Indonesia dapat dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Islam yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu

lintas pembayaran. BUS merupakan badan usaha dengan bentuk Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah. Seperti halnya Bank Umum Konvensional, BUS dapat berusaha sebagai bank devisa atau bank non devisa. Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dikantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang Islam. Dalam struktur organisasi UUS berada satu tingkat dibawah direksi bank umum konvensional. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa atau bank non devisa (Rivai dan Arifin, 2010: 163-164).

Landasan hukum yang menjadi titik tolak perkembangan Bank Islam di Indonesia adalah UU No 7 Tahun 1992, tentang Bank Indonesia. Dalam UU tersebut prinsip Islam sudah dinyatakan, meskipun masih samar, yang dinyatakan sebagai prinsip bagi hasil. Prinsip perbankan Islam secara tegas dinyatakan dalam UU No 10 Tahun 1998, yang kemudian diperbarui dengan UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan UU No 3 Tahun 2004. Undang-undang ini memberikan arahan bagi bank konvensional untuk membuka cabang Islam atau menkonversikan diri menjadi Bank Islam.

Selama periode tahun 2012, jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sampai dengan Oktober 2012 tidak mengalami perubahan, namun demikian jumlah jaringan kantor meningkat. Meskipun dengan jumlah BUS (11 bank) maupun UUS (24 unit) yang sama, namun pelayanan kebutuhan masyarakat akan perbankan syariah menjadi semakin meluas yang tercermin dari bertambahnya Kantor

1. Pembiayaan Pada Sektor UMKM

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh lembaga (Muhammad, 2005: 17). Dalam hal ini pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan UMKM sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Berikut disajikan hasil statistik deskriptif pembiayaan pada sektor UMKM yang telah diolah dengan menggunakan SPSS versi 20.0 :

Tabel 2.1
Statistik Deskriptif Pembiayaan pada sektor UMKM

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
UMKM	48	26751,00	90860,00	54062,1667	19320,31327
Valid N (listwise)	48				

Sumber : Data Output SPSS (data diolah)

Dari tabel 2.1 dengan jumlah pengamatan selama 48 bulan yang terhitung dari Januari 2009 sampai dengan Desember 2012 dapat dilihat bahwa Pembiayaan pada sektor UMKM terendah 26.751 (milyar rupiah) pada bulan Januari 2009, kemudian yang tertinggi 90.860 (milyar rupiah) pada bulan Desember 2012. Rata-rata Pembiayaan pada sektor UMKM 54.062,16 (milyar rupiah) dengan

2. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga (DPK) adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan dan lain-lain. Sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan (Rivai dan Arifin, 2010: 579).

Berikut disajikan hasil statistik deskriptif Dana Pihak Ketiga (DPK) yang telah diolah dengan menggunakan SPSS versi 20.0 :

Tabel 2.2
Statistik Deskriptif DPK

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DPK	48	38040,00	147512,00	79385,4167	32544,64890
Valid N (listwise)	48				

Sumber : Data Output SPSS (data diolah)

Dari tabel 2.2 dengan jumlah pengamatan selama 48 bulan yang dihitung dari Januari 2009 sampai dengan Desember 2012 dapat dilihat bahwa DPK terendah 38.040 (milyar rupiah) pada bulan Maret 2009, kemudian yang tertinggi 147.512 (milyar rupiah) pada bulan Desember 2012. Rata-rata DPK 79.385,41 (milyar rupiah) dengan standar deviasi 32.544,64 (milyar rupiah).

3. Return On Asset (ROA)

Return On Asset (ROA) adalah salah satu metode penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkat rentabilitas atau profitabilitas sebuah bank. Basis ini mengukur keberhasilan manajemen dalam

Berikut disajikan hasil statistik deskriptif *Non Performing Financing* (NPF) yang telah diolah dengan menggunakan SPSS versi 20.0 :

Tabel 2.4
Statistik Deskriptif NPF

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
NPF	48	,0222	,0572	,038421	,0094278
Valid N (listwise)	48				

Sumber : Data Output SPSS (data diolah)

Dari tabel 2.4 dengan jumlah pengamatan selama 48 bulan yang dihitung dari Januari 2009 sampai dengan Desember 2012 dapat dilihat bahwa NPF terendah 0,0222 pada bulan Desember 2012, kemudian yang tertinggi 0,0572 pada bulan September 2009. Pada nilai rata-rata NPF yang mencapai 3,84% menunjukkan NPF bank syariah berada pada peringkat 2 artinya tingkat permasalahan yang dihadapi oleh bank syariah dikategorikan baik (SE Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007).

5. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional bank (Taswan, 2010: 167).

Berikut disajikan hasil statistik deskriptif Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yang telah diolah dengan menggunakan SPSS versi 20.0 :

Tabel 2.5
Statistik Deskriptif BOPO

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BOPO	48	,6761	,8828	,780579	,0389966
Valid N (listwise)	48				

Sumber : Data Output SPSS (data diolah)

Dari tabel 2.5 dengan jumlah pengamatan selama 48 bulan yang dihitung dari Januari 2009 sampai dengan Desember 2012 dapat dilihat bahwa BOPO terendah 0,6761 pada bulan Maret 2009, kemudian yang tertinggi 0,8828 pada bulan Oktober 2009. Rata-rata BOPO 0,780579 dengan standar deviasi 0,0389966. Pada nilai rata-rata BOPO yang mencapai 78,05% menunjukkan BOPO bank syariah berada pada peringkat 1 artinya tingkat efisiensi bank syariah sangat baik (SE Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007).

6. Suku Bunga Bank Indonesia (BI Rate)

Suku Bunga Bank Indonesia adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.

Berikut disajikan hasil statistik deskriptif Suku Bunga BI (BI Rate) yang telah diolah dengan menggunakan SPSS versi 20.0 :

Tabel 2.6
Statistik Deskriptif BI Rate

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BIRATE	48	,0575	,0875	,065000	,0063581
Valid N (listwise)	48				

Sumber : Data Output SPSS (data diolah)

Dari tabel 2.6 dengan jumlah pengamatan selama 48 bulan yang dihitung dari Januari 2009 sampai dengan Desember 2012 dapat dilihat bahwa *BI Rate* terendah 0,0575 pada bulan Desember 2012, kemudian yang tertinggi 0,0875 pada bulan Januari 2009. Rata-rata *BI Rate* 0,065000 dengan standar deviasi 0,0063581.

7. Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi secara terus menerus selama satu periode tertentu, tetapi kenaikan harga tersebut tidak selalu dalam presentase sama (Nopirin, 1990: 25).

Berikut disajikan hasil statistik deskriptif Inflasi yang telah diolah dengan menggunakan SPSS versi 20.0 :

Tabel 2.7
Statistik Deskriptif Inflasi

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
INF	48	,0241	,0917	,049196	,0160038
Valid N (listwise)	48				

Sumber : Data Output SPSS (data diolah)

Dari tabel 2.7 dengan jumlah pengamatan selama 48 bulan yang dihitung dari Januari 2009 sampai dengan Desember 2012 dapat dilihat bahwa Inflasi terendah 0,0241 pada bulan November 2009, kemudian yang tertinggi 0,0917 pada bulan Januari 2009. Rata-rata Inflasi 0,049196 dengan standar deviasi 0,0160038. Pada nilai rata-rata Inflasi yang mencapai 4,9% menunjukkan tingkat inflasi merayap, artinya tingkat inflasi masih tergolong tingkat inflasi yang rendah (Nopirin, 1990: 27).

C. Uji Asumsi Klasik

Syarat dari model statistik parametrik adalah terbebas dari gejala-gejala klasik yaitu normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Jika ternyata model regresi terkena penyimpangan klasik, maka sebaiknya dilakukan usaha-usaha tertentu untuk menyelesaikannya.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak mempunyai distribusi normal (Gozali, 2009: 147). Model regresi yang baik adalah yang datanya berdistribusi normal. Penelitian ini menggunakan uji normalitas dengan *One-Sample Kolmogrov-Smirnov*. Pengujian *One-Sample Kolmogrov-Smirnov* dikatakan memenuhi asumsi normalitas apabila nilai signifikannya lebih besar dari nilai alpha 0,05.

Tabel 2.8
Hasil Pengujian Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2112,60156377
Most Extreme Differences	Absolute	,098
	Positive	,091
	Negative	-,098
Kolmogorov-Smirnov Z		,681
Asymp. Sig. (2-tailed)		,742

Hasil dari pengujian normalitas dapat diketahui nilai Asymp Sig (2-tailed) sebesar 0,742 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Untuk menguji ada tidaknya gejala multikolinieritas adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai VIF di bawah 10 maka model regresi yang akan diajukan tidak terdapat gejala multikolinieritas, dan sebaliknya jika nilai VIF di atas 10 maka model regresi yang diajukan terdapat gejala multikolinieritas. Serta dengan melihat nilai *tolerance* $< 0,10$ menunjukkan adanya multikolinieritas. Setiap peneliti harus menentukan tingkat kolonieritas yang masih dapat ditolelir. Jadi jika nilai VIF tidak ada yang melebihi 10 dan *tolerance* $> 0,10$, maka dapat dikatakan tidak ada multikolonieritas.

Tabel 2.9
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
DPK	,093	10,713
ROA	,123	8,131
NPF	,111	8,995
BOPO	,119	8,402
BIRATE	,194	5,151
INF	,319	3,136

a. Dependent Variable: UMKM
Sumber : Data Output SPSS (data diolah)

Pada tabel 2.9 dapat disimpulkan bahwa dalam pengujian regresi berganda ini terdapat gejala multikolinearitas, ini dapat dilihat dari nilai *tolerance* $< 0,10$ dan *VIF* > 10 yaitu pada variabel DPK, nilai *tolerance* sebesar 0,093 dan nilai *VIF* sebesar 10,713.

Menurut Ghozali (2011: 110) cara pemulihan multikolinearitas adalah :

- a. Menggabungkan data *crosssection* dan *time series* (pooling data).
- b. Keluarkan satu atau lebih variabel independen yang mempunyai korelasi tinggi dari model regresi.
- c. Transformasi variabel merupakan salah satu cara mengurangi hubungan linear diantara variabel independen.
- d. Gunakan model dengan variabel independen yang mempunyai korelasi tinggi hanya semata-mata untuk prediksi.
- e. Gunakan metode analisis yang lebih canggih seperti *bayesian regression* atau dalam kasus khusus *ridge regression*.

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh penulis yaitu mengeluarkan variabel independen yang terkena gejala multikolinearitas yaitu pada variabel DPK yang memiliki nilai

0,093 dan nilai *VIF* sebesar 10,713. Hasil pemulihan

Tabel 2.10
Hasil Pemulihan Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
ROA	,124	8,038
NPF	,358	2,796
1 BOPO	,125	7,990
BIRATE	,219	4,564
INF	,335	2,984

a. Dependent Variable: UMKM

Sumber : Data Output SPSS (data diolah)

Dari hasil pemulihan uji multikolinearitas pada tabel 2.10 dapat dilihat bahwa pada variabel independen tidak terdapat gejala mulikoloniearitas karena pada nilai *tolerance* di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10.

3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi prasyarat yang harus dipenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya masalah heteroskedastisitas. Pada penelitian ini akan dilakukan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan Uji Spearman's rho, yaitu mengkorelasikan pada model regresi nilai residual dengan masing-masing variabel independen. Jika signifikansi korelasi kurang dari 0,05 maka pada model regresi terjadi masalah heteroskedastisitas

Tabel 2.11
Hasil Uji Heteroskedisitas
Correlations

		Unstan dardiz ed Residu al	ROA	NPF	BOPO	BIRATE	INF	
Spearman's rho	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	1	0,05	-0,06	-0,1	0,025	0,021
		Sig. (2-tailed)	.	0,736	0,689	0,497	0,868	0,886
		N	48	48	48	48	48	48
	ROA	Correlation Coefficient	0,05	1	-0,04	-,943**	0,225	,314*
		Sig. (2-tailed)	0,736	.	0,774	0	0,123	0,03
		N	48	48	48	48	48	48
	NPF	Correlation Coefficient	-0,059	-0,04	1	0,093	,628**	-0,08
		Sig. (2-tailed)	0,689	0,774	.	0,531	0	0,606
		N	48	48	48	48	48	48
	BOPO	Correlation Coefficient	-0,1	,943**	0,093	1	-0,111	-0,22
		Sig. (2-tailed)	0,497	0	0,531	.	0,454	0,14
		N	48	48	48	48	48	48
	BIRATE	Correlation Coefficient	0,025	0,225	,628**	-0,11	1	,436**
		Sig. (2-tailed)	0,868	0,123	0	0,454	.	0,002
		N	48	48	48	48	48	48
	INF	Correlation Coefficient	0,021	,314*	-0,08	-0,22	,436**	1
		Sig. (2-tailed)	0,886	0,03	0,606	0,14	0,002	.
		N	48	48	48	48	48	48

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Dari hasil output pada tabel 2.11 dapat diketahui korelasi antara ROA dengan *Unstandardized Residual* nilai signifikansinya 0,736, korelasi antara NPF dengan *Unstandardized Residual* nilai signifikansinya 0,689, korelasi antara BOPO dengan *Unstandardized Residual* nilai signifikansinya 0,497, korelasi antara BI Rate dengan *Unstandardized Residual* nilai signifikansinya 0,868, dan korelasi antara Inflasi dengan *Unstandardized Residual* nilai signifikansinya 0,886. Karena nilai signifikansi korelasi lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak ditemukan adanya masalah heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode (t) dengan periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi (Ghozali, 2011: 110) :

Teknik pengujian autokorelasi yang dipakai oleh penulis adalah metode *Durbin Watson* (DW). Menurut Sunyonto (2011: 91) ketentuan dalam pengujian *Durbin Watson* (DW) adalah sebagai berikut :

- a. Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
- b. Angka D-W diantara -2 sampai 2 berarti tidak ada autokorelasi.

Tabel 2.12
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,952 ^a	,907	,895	6247,08778	1,046

a. Predictors: (Constant), INF, NPF, ROA, BIRATE, BOPO

b. Dependent Variable: UMKM

Sumber : Data Output SPSS (data diolah)

Dari output pada tabel 2.12 didapat nilai Durbin-Watson yang dihasilkan dari model regresi adalah 1,046, pada nilai DW ini diantara -2 sampai dengan 2, maka dapat disimpulkan bahwa pada uji ini tidak terdapat autokorelasi.

D. Analisis Regresi Berganda

Tabel 2.13
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	297064,325	68409,428		4,342	,000
ROA	-1310953,703	987335,428	-,178	-1,328	,191
NPF	-1465542,742	161631,444	-,715	-9,067	,000
BOPO	-127172,332	66051,555	-,257	-1,925	,061
BIRATE	-924632,219	306171,777	-,304	-3,020	,004
INF	-56024,268	98353,839	-,046	-,570	,572

a. Dependent Variable: UMKM

Sumber : Data Output SPSS (data diolah)

Hasil dari output pada tabel 2.13 di atas maka diperoleh regresi sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

$$\begin{aligned} \text{Pembiayaan UMKM} &= 297064,325 - 1310953,703\text{ROA} - \\ &1465542,742\text{NPF} - 127172,332\text{BOPO} - 924632,219\text{BIRate} - \\ &56024,268\text{Inflasi} + e \end{aligned}$$

Persamaan regresi linier berganda dilakukan untuk menjelaskan ROA, NPF, BOPO, BI *Rate*, dan Inflasi secara simultan maupun parsial terhadap Pembiayaan pada sektor UMKM yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan oleh peneliti.

Dari persamaan regresi linier berganda di atas dapat dijelaskan bahwa

1. Nilai konstanta sebesar 297064,325 menunjukkan bahwa apabila nilai dari variabel independen yaitu ROA, NPF, BOPO, BI *Rate*, dan Inflasi sendiri 0 atau konstan maka Pembiayaan UMKM sebesar 297064,325.
2. Koefisien regresi untuk variabel *Return On Asset* (ROA) adalah sebesar -1310953,703. Nilai koefisien yang negatif tidak memiliki pengaruh apapun terhadap nilai Pembiayaan UMKM karena nilai signifikansinya di atas 0,05 atau 5%.
3. Koefisien regresi untuk variabel *Non Performing Financing* (NPF) adalah sebesar -1465542,742. Nilai koefisien yang negatif menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan UMKM, dan jika apabila NPF mengalami kenaikan sebesar 1%, maka nilai pembiayaan UMKM akan mengalami penurunan sebesar 1465542,742 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya konstan.

4. Koefisien regresi untuk variabel BOPO adalah sebesar -127172,332. Nilai koefisien yang negatif tidak memiliki pengaruh apapun terhadap nilai Pembiayaan UMKM karena nilai signifikansinya di atas 0,05 atau 5%.
5. Koefisien regresi untuk variabel *BI Rate* adalah sebesar -924632,219. Nilai koefisien yang negatif menunjukkan bahwa *BI Rate* berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan UMKM, dan jika apabila *BI Rate* mengalami kenaikan sebesar 1%, maka nilai pembiayaan UMKM akan mengalami penurunan sebesar 924632,219 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya konstan.
6. Koefisien regresi untuk variabel Inflasi adalah sebesar -56024,268. Nilai koefisien yang negatif tidak memiliki pengaruh apapun terhadap nilai Pembiayaan UMKM karena nilai signifikansinya di atas 0,05 atau 5%.

E. Uji Hipotesis

1. Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan bahwa apakah semua variabel independen yang dimaksudkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Berikut hasil uji F yang diolah menggunakan SPSS 20.0 yang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.14
Hasil Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	15904805282,991	5	3180961056,598	81,509	,000 ^b
Residual	1639096439,676	42	39026105,707		
Total	17543901722,667	47			

a. Dependent Variable: UMKM

b. Predictors: (Constant), INF, NPF, ROA, BIRATE, BOPO
Sumber : Data Output SPSS (data diolah)

Dari hasil analisis regresi dapat diketahui bahwa secara bersama-sama variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai F hitung sebesar 81,509 dengan nilai signifikansi (sig) sebesar 0,00. Karena nilai signifikansi (sig) jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pembiayaan pada sektor UMKM atau dapat dikatakan bahwa ROA, NPF, BOPO, BI *Rate*, dan Inflasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan pada sektor UMKM. Sehingga hipotesis yang menyatakan ROA, NPF, BOPO, BI *Rate*, dan Inflasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan pada sektor UMKM dapat diterima.

2. Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasar menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara parsial dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berikut hasil uji t yang diolah dengan

Tabel 2.15
Hasil Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	297064,325	68409,428		4,342	,000
ROA	-1310953,703	987335,428	-,178	-1,328	,191
NPF	-1465542,742	161631,444	-,715	-9,067	,000
BOPO	-127172,332	66051,555	-,257	-1,925	,061
BIRATE	-924632,219	306171,777	-,304	-3,020	,004
INF	-56024,268	98353,839	-,046	-,570	,572

a. Dependent Variable: UMKM

Sumber : Data Output SPSS (data diolah)

Dari hasil uji t, suatu variabel dependen memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel independen dengan membandingkan nilai probabilitas signifikansi pada tabel hasil perhitungan $\alpha = 5\%$. Suatu variabel independen berpengaruh secara signifikan jika nilai signifikansi hasil perhitungan lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 5\%$ tingkat signifikan). Berdasarkan perhitungan pada tabel 2.15 dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Dari output hasil Uji T pada tabel 4.15 dapat dilihat bahwa nilai t dari ROA sebesar -1,328 dan nilai signifikansi sebesar 0,191, Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($\alpha = 5\%$), maka dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara

variabel ROA terhadap pembiayaan pada sektor UMKM

- b. Dari output hasil Uji T pada tabel 4.15 dapat dilihat bahwa nilai t dari NPF sebesar $-9,067$ dan nilai signifikansi sebesar $0,000$. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari $0,05$ ($\alpha = 5\%$), maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel NPF terhadap pembiayaan pada sektor UMKM.
- c. Dari output hasil Uji T pada tabel 4.15 dapat dilihat bahwa nilai t dari BOPO sebesar $-1,925$ dan nilai signifikansi sebesar $0,061$. Karena nilai signifikansi lebih besar dari $0,05$ ($\alpha = 5\%$), maka dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel BOPO terhadap pembiayaan pada sektor UMKM.
- d. Dari output hasil Uji T pada tabel 4.15 dapat dilihat bahwa nilai t dari *BI Rate* sebesar $-3,020$ dan nilai signifikansi dari *BI Rate* sebesar $0,004$. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari $0,05$ ($\alpha = 5\%$), maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel *BI Rate* terhadap pembiayaan pada sektor UMKM.
- e. Dari persamaan regresi pada tabel 4.15 dapat dilihat bahwa nilai t dari Inflasi sebesar $-0,570$ dan nilai signifikansi sebesar $0,572$. Karena nilai signifikansi lebih besar dari $0,05$ ($\alpha = 5\%$), maka dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Inflasi terhadap pembiayaan pada sektor UMKM.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur seberapa jauh yaitu kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen yaitu pembiayaan pada sektor UMKM. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen yang terdiri dari ROA, NPF, BOPO, Suku Bunga BI (*BI Rate*), dan Inflasi dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011:97).

Tabel 2.16
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,952 ^a	,907	,895	6247,08778	1,046

a. Predictors: (Constant), INF, NPF, ROA, BIRATE, BOPO

b. Dependent Variable: UMKM

Sumber : Data Output SPSS (data diolah)

Dari hasil output pada tabel 2.16 menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,895 yang berarti 89,5% variabel dependen pembiayaan pada sektor UMKM dapat dijelaskan oleh variabel independen (ROA, NPF, BOPO, *BI Rate*, dan Inflasi) sedangkan

menghasilkan laba secara keseluruhan dengan cara membandingkan antara laba sebelum pajak dengan total aset. ROA juga menggambarkan perputaran aktiva yang diukur dari volume penjualan. Semakin besar ROA sebuah bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai, dan semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank syariah dalam mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan (Rivai dan Arifin, 2010: 866). Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin besar tingkat keuntungan yang didapat, maka semakin besar pula upaya manajemen bank syariah menginvestasikannya dalam bentuk pembiayaan UMKM, sehingga bukan hanya dari dana himpunan yang dapat disalurkan akan tetapi juga dari keuntungan bank syariah yang bisa disalurkan untuk pembiayaan UMKM.

Pada hasil penelitian ini, rasio ROA tidak mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan pada sektor UMKM. Hal ini ada beberapa argumentasi yang menyebabkan tidak berpengaruhnya ROA terhadap pembiayaan UMKM, di antaranya nilai rasio ROA yang dihasilkan oleh bank syariah tidak banyak memberikan kontribusi laba terhadap pembiayaan UMKM yang disalurkan, karena pada 4 tahun pengamatan dalam penelitian ini terdapat variasi nilai rasio ROA, terbukti dengan nilai ROA yang bersifat variatif tidak diimbangi dengan nilai pembiayaan UMKM bank syariah yang terus mengalami kenaikan, justru dengan variatifnya nilai ROA pembiayaan terus

mengalami kenaikan, sehingga keadaan ini bisa memicu tidak berpengaruhnya ROA terhadap pembiayaan UMKM. Nilai pembiayaan yang terus mengalami kenaikan justru dipengaruhi oleh dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun, karena dari data pengamatan terbukti DPK berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM, dimana semakin tinggi nilai DPK yang dihimpun, maka semakin meningkat pembiayaan UMKM bank syariah yang disalurkan. Jika menilik pada nilai rata-rata ROA selama empat tahun pengamatan adalah sebesar 1,87% menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan UMKM terhadap perolehan laba bank syariah sangat tinggi, namun nilai rata-rata ROA yang hanya mencapai 1,87% pada kenyataannya terdapat variasi yang beragam tidak menunjukkan kenaikan yang berlanjut dan pengaruhnya tidak terlalu kuat terhadap pembiayaan UMKM. Jadi tingkat nilai rasio ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan pada sektor UMKM, terbukti dengan variatifnya nilai rasio ROA tidak mempengaruhi pembiayaan pada sektor UMKM.

Kondisi ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Luh Gede (2007), Dias (2010), I Made (2010), dan Nurhidayat (2010) yang menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap penawaran kredit UMKM. Tetapi hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wuri (2011) yang menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan

3. Hipotesis Ketiga (H3)

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan UMKM. Berdasarkan hasil pengujian parsial (uji t) antara variabel NPF dengan pembiayaan UMKM menunjukkan nilai t sebesar -9,067, koefisien regresi sebesar -1465542,742 dan nilai probabilitas sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan UMKM, sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan pada sektor UMKM diterima.

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Rasio ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi rasio NPF menunjukkan semakin buruk kualitas pembiayaan yang disalurkan (Taswan, 2010: 166).

Rasio ini mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. Semakin tinggi nilai rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk (Rivai dan Arifin, 2010: 858). Hal ini sangat berkaitan dengan pembiayaan sektor UMKM, karena pembiayaan sektor UMKM bermasalah yang tinggi dapat menimbulkan keengganan bank untuk menyalurkan pembiayaan sektor UMKM itu sendiri, karena harus membentuk cadangan

untuk memenuhi PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) yang diambil dari laba bank yang dijadikan modal cadangan. Tingginya rasio NPF akan membebani PPAP bank syariah yang berdampak pada pengurangan pendapatan yang dihasilkan dari penyaluran pembiayaan UMKM, sehingga pembiayaan sektor UMKM cenderung rendah.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Akhyar (2005), Dias (2010), dan Nurhidayat (2010) yang menunjukkan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM. Tetapi hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Luh Gede (2007), I Made (2010), Wuri (2011), dan Sukma (2011) yang menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan pada sektor UMKM.

4. Hipotesis Keempat (H4)

Hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan UMKM. Berdasarkan hasil pengujian parsial (uji t) antara variabel BOPO dengan pembiayaan UMKM menunjukkan nilai t sebesar -1,925 koefisien regresi sebesar -127172,332 dan nilai probabilitas sebesar 0,061 yang lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa BOPO tidak berpengaruh signifikan

menyatakan BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan pada sektor UMKM tidak terbukti.

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional bank. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin tidak efisien biaya operasional bank (Taswan, 2010: 167). Semakin tinggi nilai rasio BOPO, maka akan semakin sedikit pembiayaan sektor UMKM yang disalurkan oleh bank, karena tingkat keuntungan yang dimiliki oleh bank dikeluarkan untuk biaya operasional tidak untuk diinvestasikan kembali kepada pembiayaan sektor UMKM, sehingga hanya dari dana himpunan yang dapat disalurkan.

Pada hasil penelitian ini, rasio BOPO tidak mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan pada sektor UMKM. Hal ini ada beberapa argumentasi yang menyebabkan tidak berpengaruhnya BOPO terhadap pembiayaan UMKM, di antaranya nilai rasio BOPO bank syariah yang rendah sehingga manajemen bank syariah dapat mengendalikan biaya operasional dengan semaksimal mungkin dan juga bisa memaksimalkan pembiayaan pada sektor UMKM. Jika menilik pada nilai rata-rata BOPO selama empat tahun pengamatan adalah sebesar 78,05% menunjukkan bahwa nilai rasio BOPO berada pada peringkat pertama yang artinya nilai BOPO tergolong sangat

baik, sehingga rasio ini tidak berpengaruh terhadap ROA yang dihasilkan dari pembiayaan pada sektor UMKM.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dias (2010) yang menunjukkan bahwa BOPO tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit bank umum.

5. Hipotesis Kelima (H5)

Hipotesis kelima yang diajukan dalam penelitian ini adalah *BI Rate* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan pada sektor UMKM. Berdasarkan hasil pengujian parsial (uji t) antara variabel Inflasi dengan pembiayaan UMKM menunjukkan nilai t sebesar -3,020, koefisien regresi sebesar -924632,219 dan nilai probabilitas sebesar 0,04 yang lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa *BI Rate* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan UMKM, sehingga hipotesis kelima yang menyatakan *BI Rate* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan pada sektor UMKM diterima.

Menurut Bank Indonesia, *BI Rate* merupakan suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan diumumkan kepada publik. Jika suku bunga Bank Indonesia naik, maka akan diikuti dengan naiknya suku bunga simpanan pada bank konvensional, maka secara

Operasional perbankan konvensional, penetapan tingkat suku bunga tabungan dan tingkat suku bunga kredit selalu ditetapkan berdasarkan *BI Rate*, sedangkan dalam perbankan syariah secara peraturan tidak ada aturan yang mendasari perbankan syariah untuk mengacu pada *BI Rate*, hal ini dikarenakan secara prinsip penetapan nisbah bagi hasil dan margin pembiayaan UMKM diperbankan syariah tidak berdasarkan pada sistem bunga, dimana pada sistem bunga menjanjikan keuntungan yang sudah pasti dan ditentukan diawal. Hal ini berbeda dengan perbankan syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil dengan memberikan keuntungan kepada nasabahnya sesuai dengan keuntungan yang didapat atau sesuai dengan kinerja perbankan syariah itu sendiri dalam mengelola pembiayaan UMKM, dimana ketika kinerja pembiayaan UMKM bank syariah meningkat dan menghasilkan pendapatan yang tinggi, maka akan meningkat pula tingkat bagi hasil yang didapat oleh nasabah.

Pada kenyataannya saat ini hal tersebut belum diterapkan secara *kaffah*, karena masih kecilnya perbankan syariah dalam memperoleh pangsa pasar perbankan nasional, sehingga cenderung perbankan syariah mengacu dan menyesuaikan pada *BI Rate*. Ketika *BI Rate* tinggi maka bank syariah harus melakukan penyesuaian dengan menaikkan nisbah bagi hasil, begitu juga dengan pembiayaan UMKM bank syariah, ketika *BI Rate* turun maka bank syariah juga harus melakukan penyesuaian dengan menurunkan nisbah bagi hasil.

UMKM, agar perbankan syariah mampu bersaing dengan bank konvensional

Menurut Muhammad (2005:111), konsep ideal yang harus dilakukan perbankan syariah dalam menghadapi persaingan dengan perbankan konvensional khususnya dalam produk *funding* adalah perbankan syariah harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan dana minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang ditawarkan perbankan konvensional, dan mampu menarik bagi hasil dari debitur lebih rendah dari tingkat bunga kredit yang berlaku di perbankan konvensional karena masyarakat sampai sekarang masih membandingkan tingkat suku bunga perbankan konvensional dengan tingkat bagi hasil perbankan syariah, jika bagi hasil yang diberikan perbankan syariah lebih kecil dari suku bunga, maka dimungkinkan banyak nasabah yang akan beralih ke perbankan konvensional.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Dias (2010), yang menunjukkan bahwa *BI Rate* tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit bank umum. Tetapi hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayat (2010) yang menunjukkan bahwa *BI Rate* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit bank umum.

6. Hipotesis Keenam (H6)

Hipotesis keenam yang diajukan dalam penelitian ini adalah Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan UMKM. Berdasarkan hasil pengujian parsial (uji t) antara variabel Inflasi dengan Pembiayaan UMKM menunjukkan nilai t sebesar -0,570, koefisien regresi sebesar -56024,268 dan nilai probabilitas sebesar 0,572 yang lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa Inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM, sehingga hipotesis keenam yang menyatakan Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan pada sektor UMKM tidak terbukti.

Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang secara terus menerus. Tapi kenaikan tersebut tidak dalam prosentase yang sama dan mungkin dapat terjadi kenaikan tidaklah bersamaan, yang penting terdapat kenaikan harga umum barang secara terus menerus selama satu periode tertentu (Nopirin, 1990: 25).

Laju inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat mengganggu upaya perbankan syariah dalam menggerakkan dana masyarakat, karena dengan adanya inflasi menyebabkan Bank Indonesia mengeluarkan regulasi untuk menaikkan suku bunga simpanan yang tentunya akan berimbas pada naiknya margin pembiayaan dan hasrat masyarakat untuk menabung akan menurun meskipun nisbah bagi hasil simpanan tinggi karena masyarakat cenderung memilih untuk menyimpan

bank untuk memenuhi kebutuhan yang semakin besar, sehingga dana himpunan yang akan disalurkan kepada sektor UMKM semakin sedikit.

Pada hasil penelitian ini, variabel inflasi tidak mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan UMKM. Hal ini ada beberapa argumentasi yang menyebabkan tidak berpengaruhnya Inflasi terhadap pembiayaan UMKM. *Pertama*, jika kita memperhatikan rata-rata inflasi pada masa pengamatan penelitian, rata-rata tingkat inflasi hanya 4,9% sehingga termasuk dalam golongan Inflasi merayap. Dalam Nopirin (1990:27) menyatakan laju inflasi yang rendah atau kurang dari 10% dikategorikan dalam inflasi merayap sehingga tidak memicu gejala-gejala negatif yang disebabkan oleh inflasi yang akhirnya berdampak negatif terhadap pembiayaan UMKM. *Kedua*, pergerakan inflasi yang rendah juga tidak akan banyak mempengaruhi kenaikan tingkat margin pembiayaan UMKM, sehingga masih dapat dijangkau oleh masyarakat.

Hasil ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Luluk (2010), dan Nurhidayat (2010) yang menunjukkan bahwa Inflasi